

LKIP

**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH**

**KECAMATAN RAWALUMBU
KOTA BEKASI**

**TAHUN
2025**





KATA PENGANTAR

Berkat Berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi dapat diterbitkan. Dengan telah berakhirnya Tahun 2025 berarti Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi telah menyelesaikan kegiatannya. Dikaitkan dengan Rencana Pembangunan Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026 dan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 yang telah digunakan sebagai acuan bagi pelaksanaan kegiatan Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi dalam upaya memenuhi visi dan misinya.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini dimaksudkan untuk :

1. Menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan dan Pembangunan secara baik dan benar yang didasarkan kepada perundang-undangan yang berlaku;
2. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga dapat melaksanakan tugas secara efisien, efektif dan responsif;
3. Menjadikan masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka menyangkut kinerja instansi pemerintah;
4. Adanya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi yang memiliki kewewenangan dalam pemerintahan khususnya pada perencanaan pembangunan daerah yang berperan penting dalam konstelasi perencanaan pembangunan di Kota Bekasi. Peran tersebut sangat terlihat pengaruhnya pada dinamika pembangunan di Kota Bekasi, baik yang berdimensi lokal, regional, dan nasional. Hal ini merupakan perwujudan cita-cita dari visi Kota Bekasi yang Maju, Sejahtera dan Ihsan. Untuk mendukung semua itu, seluruh daya upaya dilakukan melalui beragam aspek, yaitu aspek penguatan integrasi, aspek sosialisasi, aspek pemerintahan umum dan aspek pembinaan aparatur perencanaan pembangunan.



**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kecamatan Rawalumbu
Tahun 2025**

Akhirnya laporan ini dapat tersaji menjadi sarana evaluasi yang konstruktif dan dapat memberi manfaat yang optimal serta dimaknai secara positif oleh seluruh jajaran Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi bagi peningkatan manajemen kinerja yang lebih baik di masa mendatang.

Bekasi, Februari 2026

CAMAT RAWALUMBU,



Sri Susilawati, S.STP., M.Si

Pembina / IV.a

NIP. 19770216 199703 2 003



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	4
DAFTAR GAMBAR	5
DAFTAR TABEL.....	6
RINGKASAN EKSEKUTIF	7
BAB I PENDAHULUAN	9
1.1 Latar Belakang.....	9
1.2 Tujuan dan Manfaat.....	11
1.3 Tugas Fungsi dan Wewenang Organisasi	12
1.4 Struktur Organisasi.....	14
1.5 Sumber Daya	16
1.6 Aspek Straregis dan Isu Strategis	19
1.7 Sistematika Penyajian.....	27
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	29
2.1 Visi Misi RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029	29
2.2 Rencana Strategis Kecamatan Rawalumbu	30
2.3 Perjanjian Kinerja	36
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	43
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	43
3.2. Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama	45
3.2.1 Persentase LKM Aktif yang Mendukung Pelayanan Publik.	45
3.2.2 Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	56
3.3 Realisasi Anggaran	66
BAB IV PENUTUP	69
4.1 Kesimpulan Umum	69
4.1.1 Simpulan Capaian Kinerja	70
1.2 Rencana Tindak Lanjut.....	70



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Rawalumbu	15
--	----



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2024-2026	30
Tabel 2 Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029	31
Tabel 3 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Rawalumbu Berdasarkan Renstra Tahun 2024-2026	33
Tabel 4 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Rawalumbu Berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029	34
Tabel 5 Perjanjian Kinerja Kecamatan Rawalumbu Tahun 2025 Sebelum Perubahan.....	37
Tabel 6 Perjanjian Kinerja Kecamatan Rawalumbu Tahun 2025 Setelah Perubahan	37
Tabel 7 Alokasi Anggaran Per Triwulan	38
Tabel 8 Capaian Kinerja Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi Tahun 2025	44
Tabel 9 Analisis Capaian Indikator Kinerja Persentase LKM Aktif yang mendukung pelayanan publik.....	47
Tabel 10 Indikator Capaian Kegiatan Pendukung Indikator Kinerja Utama Persentase LKM Aktif yang mendukung pelayanan publik	48
Tabel 11 Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Persentase LKM Aktif yang mendukung pelayanan publik di Kecamatan Rawalumbu Target Renstra 2025-2029 ..	49
Tabel 12 Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Untuk Indikator Kinerja Sasaran Persentase LKM Aktif yang Mendukung Pelayanan Publik di Kecamatan Rawalumbu	52
Tabel 13 Perhitungan Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat	57
Tabel 14 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025.....	57
Tabel 15 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan dengan Tahun Sebelumnya	58
Tabel 16 Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Rawalumbu Target Renstra 2025-2029 ..	59
Tabel 17 Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Untuk Indikator Kinerja Sasaran Persentase LKM Aktif yang Mendukung Pelayanan Publik di Kecamatan Rawalumbu	62
Tabel 18 Pagu Anggaran Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi Per Program Tahun 2025	67
Tabel 19 Realisasi Anggaran Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi Per Program Tahun 2025 ..	67



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari serangkaian perencanaan kinerja, pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran selama Tahun Anggaran 2025.

Pertanggungjawaban Kinerja Kecamatan Rawalumbu disajikan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Kinerja (LKIP). Penyusunan LKIP Kecamatan Rawalumbu berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, penyusunan LKIP mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026 dan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029, Rencana Kinerja Tahun 2025, Perjanjian Kinerja Tahun 2025 serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD Tahun 2025.

Berdasarkan hasil realisasi keuangan dan fisik kegiatan dan pekerjaan yang telah dilakukan secara umum pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi Tahun Anggaran 2025 berjalan sesuai dengan Output dan Outcome sudah dicapai dan tidak mengalami permasalahan dan hambatan yang berarti dalam pelaksanaan program kerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategis instansi pemerintah yang mengidikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban Kecamatan Rawalumbu atas penyelenggaraan program kegiatan pada tahun 2025 yang sekaligus menjadi masukan dan bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya.

Laporan Kinerja ini disusun dengan menyajikan hasil Pengukuran Kinerja yang merupakan bentuk penilaian yang dilakukan terhadap keberhasilan dan



kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Rawalumbu yang dilaksanakan tahun 2025. Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya.

Sesuai Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2004 tentang pembentukan Wilayah Administrasi Kecamatan Rawalumbu dan Kelurahan Kota Bekasi, Kecamatan Rawalumbu sebagai salah satu unit kerja terdepan di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, maka berdasarkan Keputusan Walikota Bekasi Nomor 92 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Kecamatan Kota Bekasi, Kecamatan berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan.

Sementara apabila dibandingkan dengan target perencanaan jangka menengah, maka terlihat bahwa pada tahun 2025 ini hampir keseluruhan target yang telah ditetapkan telah tercapai. Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam Renstra Kecamatan Rawalumbu Tahun 2024-2026 dan Renstra Kecamatan Rawalumbu Tahun 2025-2029 khususnya untuk Tahun Anggaran 2025 terpenuhi sesuai dengan harapan.

Memperhatikan perbandingan capaian kinerja antara target indikator yang realisasi Kinerja Kecamatan Rawalumbu nampak seluruh indikator yang direncanakan berhasil dicapai dengan optimal sesuai target. Hal ini tidak terlepas dari keberhasilan pembinaan dan komitmen kuat dari seluruh pihak mulai dari Camat, Sekretaris Camat beserta para Kasi dan kasubag dan seluruh pelaksana di lingkungan Kecamatan Rawalumbu dalam melaksanakan program kegiatan sesuai dengan prinsip efektifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Pertanggungjawaban tersebut disajikan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Pemerintah Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, penyusunan LKIP mengacu pada RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029, Rencana Kinerja Tahun 2025, Perjanjian Kinerja Tahun 2025 serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD Tahun 2025.

Sesuai Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2004 tentang pembentukan Wilayah Administrasi Kecamatan Rawalumbu dan Kelurahan Kota Bekasi, Kecamatan Rawalumbu sebagai salah satu unit kerja terdepan di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi. Percepatan pembangunan dan perkembangan wilayah menimbulkan pengaruh yang cukup besar, baik secara fisik maupun non fisik di wilayah Kecamatan Rawalumbu, hal ini terlihat pada beberapa faktor yang menentukan, diantaranya yaitu :

1. Tingkat pertumbuhan pemukiman baru yang tinggi di wilayah Kecamatan menimbulkan penambahan penduduk dan berkembangnya berbagai permasalahan kependudukan;
2. Tingkat pertumbuhan fasilitas umum seperti telepon,



prasarana perhubungan, listrik dan perbelanjaan semakin meningkat;

3. Tingkat kebutuhan prasarana sosial seperti prasarana peribadatan, pendidikan dan kesehatan meningkat;
4. Karakteristik dan dinamika kehidupan masyarakat menjadi heterogen karena memiliki keterpaduan antara kehidupan pedesaan dan perkotaan.

Untuk mendukung pencapaian kinerja Kecamatan Rawalumbu menjadi bagian dalam penyusunan LKIP ini analisa keberhasilan pencapaian indikator kinerja utama (IKU) Kecamatan Rawalumbu yang telah ditetapkan pada tahun 2025 yang berkeselarasan dengan Sasaran Strategis yaitu :

1. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Rawalumbu yang pertama adalah Meningkatnya LKM Aktif yang mendukung Pelayanan Publik di Kecamatan Rawalumbu dengan Indikator Sasaran yaitu Persentase LKM Aktif yang mendukung Pelayanan Publik. Penetapan sasaran strategis ini untuk menunjang pencapaian Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi 2025-2029 dan Rencana Strategis Kecamatan Rawalumbu Tahun 2025-2029 yaitu Terwujudnya Estetika Kota disertai Infrastruktur Modern dan Kualitas Pelayanan Publik yang Prima di Kecamatan Rawalumbu terutama dalam menunjang pencapaian indikator Tujuan Kecamatan Rawalumbu yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik.
2. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Rawalumbu yang kedua adalah Meningkatnya Kualitas Pelayanan publik yang Prima pada Kecamatan Rawalumbu dengan Indikator Sasaran yaitu Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan. Penetapan sasaran strategis ini untuk menunjang pencapaian Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi pada



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi 2025-2029 dan Rencana Strategis Kecamatan Rawalumbu Tahun 2025-2029 yaitu Terwujudnya Estetika Kota disertai Infrastruktur Modern dan Kualitas Pelayanan Publik yang Prima di Kecamatan Rawalumbu terutama dalam menunjang pencapaian indikator Tujuan Kecamatan Rawalumbu yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik.

Jika melihat capaian indikator kinerja utama kecamatan rawalumbu pada tahun 2025 dimana indikator Persentase LKM Aktif yang Mendukung Pelayanan Publik memperoleh capaian kinerja sebesar 100% dari target sebesar 70%, indikator Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Rawalumbu memperoleh capaian kinerja sebesar 6,67% dari target sebesar 0,54.

Berdasarkan latar belakang diatas, untuk melakukan pembahasan lebih lanjut secara komperhensif mengenai kinerja Kecamatan Rawalumbu pada tahun 2025 sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah dibuat, akan kami bahas pada BAB III (AKUNTABILITAS KINERJA) pada laporan kinerja kecamatan rawalumbu tahun 2025 ini.

1.2 Tujuan dan Manfaat

A. Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja instansi pemerintah (LKIP) Kecamatan Rawalumbu Tahun 2025 memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Perencanaan

Data dan temuan evaluasi kinerja menjadi bahan masukan yang kritis untuk menyusun **Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2026** yang lebih realistis dan tepat sasaran.

2. Penilaian Capaian Organisasi

Mengukur dan mengevaluasi tingkat keberhasilan Kecamatan Rawalumbu dalam merealisasikan target kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025, Perubahan Rencana Kerja (Renja) tahun 2025, dan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2025-2029.



3. Pemacu Peningkatan Kinerja

Menciptakan budaya kinerja berorientasi hasil (*results-oriented*) di dalam organisasi, mendorong efisiensi, efektivitas, dan inovasi dalam pemanfaatan sumber daya anggaran dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

B. Manfaat

Laporan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

1. Alat Evaluasi Internal

Menjadi alat diagnosis untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, tantangan, dan peluang dalam pelaksanaan program/kegiatan.

2. Pendorong Inovasi dan Perbaikan

Membantu memfokuskan upaya perbaikan pada program/kegiatan yang belum mencapai target, sehingga mendorong inovasi dalam metode kerja dan pelayanan.

3. Kejelasan Manfaat Program

Masyarakat dapat melihat secara konkrit output dan outcome dari program pembangunan dan pelayanan yang dilaksanakan di wilayahnya, seperti perbaikan infrastruktur jalan lingkungan, peningkatan pelayanan administrasi, program pemberdayaan masyarakat.

1.3 Tugas Fungsi dan Wewenang Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi. Kecamatan adalah unsur perangkat daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dengan tugas pokok membantu Wali Kota dalam menyelenggarakan kewenangan di bidang perencanaan umum dan strategis yang mencakup seluruh bidang kewenangan pemerintah serta mengevaluasi pelaksanaannya.



A. Tugas Pokok

Pada Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 62 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 92 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Kecamatan Kota Bekasi yang menempatkan Kecamatan sebagai unsur lini kewilayahan dalam struktur Pemerintah Kota Bekasi. Berdasarkan Peraturan Wali Kota tersebut Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dalam rangka pemerintahan mempunyai tugas pokok untuk meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan.

B. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kecamatan Rawalumbu menyelenggarakan fungsi:

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum
Koordinator Wilayah: Menyelaraskan kegiatan perangkat daerah, instansi vertikal, dan pihak terkait di tingkat kecamatan agar sejalan dengan kebijakan Wali Kota.
2. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengoordinasian kegiatan ekonomi dan pembangunan;
4. Pengoordinasian kegiatan sosial kemasyarakatan;
5. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
6. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota;
7. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
Penyelenggara Pelayanan Publik: Melaksanakan pelayanan administratif (seperti kependudukan dan pertnahan/PPTAS) perizinan serta pemeliharaan sarana prasarana umum;
8. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;



9. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
Pembinaan Kelurahan: Melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap jalannya pemerintahan serta pelayanan di tingkat Kelurahan;
10. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kota yang ada di Kecamatan;
11. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota;
12. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Wewenang

Sesuai dengan regulasi yang berlaku, Kecamatan Rawalumbu memiliki wewenang untuk:

1. Mengoordinasikan upaya penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota di tingkat kecamatan;
2. Melaksanakan perizinan tertentu dan pelayanan administrasi (termasuk PPATS) sesuai batas kewenangan yang didelegasikan.
3. Mengelola sumber daya aparatur dan anggaran kecamatan guna mendukung akselerasi pembangunan wilayah.

1.4 Struktur Organisasi

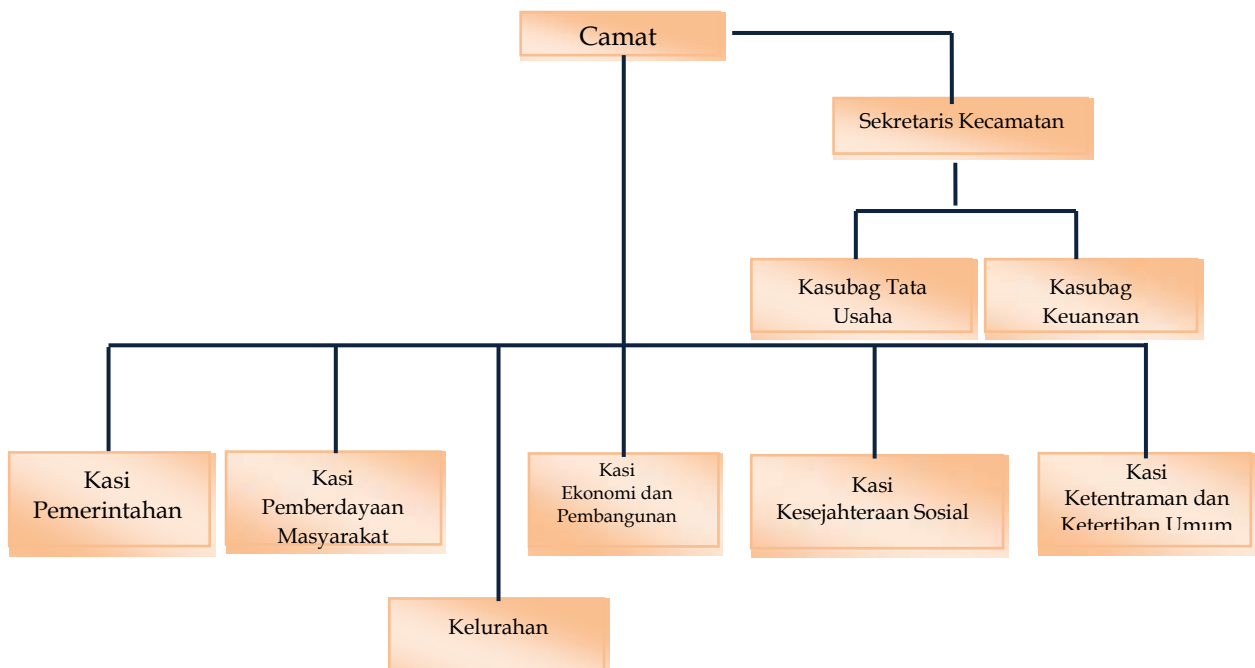
Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi tersebut, maka berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 92 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Kecamatan Kota Bekasi, Kecamatan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan. Camat dibantu oleh Sekretaris Kecamatan yang



mengelola Perencanaan, Kepegawaian Umum dan Keuangan serta didukung oleh 5 (lima) Seksi, berikut Susunan Organisasi Kecamatan Rawalumbu terdiri dari:

1. Pimpinan adalah Camat;
2. Pembantu pimpinan adalah Sekretariat Kecamatan dan Sub Bagian;
3. Pelaksana adalah Seksi dan kelompok jabatan fungsional

Gambar 1 Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Rawalumbu



Sumber : Kecamatan Rawalumbu Tahun 2024

1. Seksi Pemerintahan
Mempunyai tugas membantu camat melaksanakan kewenangan Kecamatan di bidang Pemerintahan sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
Mempunyai tugas membantu camat melaksanakan kewenangan kecamatan di bidang Pemberdayaan Masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Seksi Kesejahteraan Sosial
Menangani mempunyai tugas membantu camat melaksanakan



kewenangan kecamatan di bidang Kesejahteraan Sosial.

4. Seksi Ekonomi Pembangunan

Menangani mempunyai tugas membantu camat melaksanakan kewenangan kecamatan di bidang Ekonomi dan Pembangunan.

5. Seksi Keamanan dan Ketertiban

Menangani mempunyai tugas membantu camat melaksanakan kewenangan kecamatan di bidang Keamanan Ketertiban sesuai ketentuan yang berlaku.

1.5 Sumber Daya

Untuk memastikan pencapaian target strategis, khususnya dalam melaksanakan kordinasi pemerintahan dan meningkatkan pelayanan publik, Kecamatan Rawalumbu didukung oleh sumber daya yang memadai, baik dari sisi personil maupun sarana prasarana.

A. Sumber Daya Manusia

Kecamatan Medansatria didukung oleh aparatur yang kompeten untuk menjalankan fungsi koordinasi pemerintahan dan pelayanan publik. Jumlah keseluruhan Aparatur Kecamatan Rawalumbu adalah 166 orang, status kepegawaian aparatur disajikan lebih rinci pada tabel di bawah ini:

NO	STATUS KEPEGAWAIAN	JUMLAH PEGAWAI	PANGKAT GOLONGAN			
			IV	III	II	I
1	Camat Rawalumbu Kota Bekasi	1	1			
2	Sekretaris Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi	1		1		
3	Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi	1		1		
4	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi	1		1		
5	Kepala Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi	0		0		
6	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kota Bekasi	1		1		
7	Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi	1	1			
8	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi	1		1		



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kecamatan Rawalumbu
Tahun 2025

NO	STATUS KEPEGAWAIAN	JUMLAH PEGAWAI	PANGKAT GOLONGAN			
			IV	III	II	I
9	Kepala Sub Bagian Keuangan Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi	1		1		
10	Lurah Bojong Rawalumbu Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi	1		1		
11	Lurah Sepanjangjaya Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi	1	1			
12	Lurah Bojongmenteng Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi	1		1		
13	Lurah Pengasinan Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi	1	1			
14	Sekretaris Kelurahan Pengasinan Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi	1		1		
15	Sekretaris Kelurahan Bojong Rawalumbu Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi	1		1		
16	Sekretaris Kelurahan Sepanjangjaya Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi	1		1		
17	Plt. Sekretaris Kelurahan Bojongmenteng Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi	0		0		
18	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kelurahan Sepanjangjaya Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi	1				
19	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kelurahan Pengasinan Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi	1				
20	Plt. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kelurahan Bojongmenteng Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi	0		1		
21	Plt. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kelurahan Bojong Rawalumbu Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi	1		1		
22	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dan Pembangunan Kelurahan Bojongmenteng Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi	1	1			
23	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Kelurahan Sepanjangjaya Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi	1		1		
24	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dan Pembangunan Kelurahan Pengasinan Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi	1		1		
25	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Kelurahan Bojong Rawalumbu Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi	1		1		



**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kecamatan Rawalumbu
Tahun 2025**

NO	STATUS KEPEGAWAIAN	JUMLAH PEGAWAI	PANGKAT GOLONGAN			
			IV	III	II	I
26	Kepala Seksi Pemerintahan Dan Trantibum Kelurahan Bojongmenteng Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi	1		1		
27	Kepala Seksi Pemerintahan Dan Trantibum Kelurahan Pengasinan Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi	1		1		
28	Kepala Seksi Pemerintahan Dan Trantibum Kelurahan Bojong Rawalumbu Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi	1		1		
29	Kepala Seksi Pemerintahan Dan Trantibum Kelurahan Sepanjangjaya Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi	1		1		
30	Staf Pelaksana (PNS)	11		9	2	
31	Staf Pelaksana (PPPK)	125		49	76	
32	PPPK Paruh Waktu	37				
33	PJLP	2				
Total		201	5	78	78	

Penerapan Budaya Kerja ASN “BerAKHLAK” menjadi landasan utama dalam menjaga nilai AKIP tetap tinggi dan memastikan pelayanan kepada masyarakat dilakukan secara professional dan akuntabel.

B. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Sebagai organisasi kewilayahan yang mendekatkan jangkauan birokrasi kepada masyarakat, sarana prasarana diarahkan pada standarisasi pelayanan prima. Sarana prasarana Kecamatan Rawalumbu yang dipergunakan, disajikan dalam tabel dibawah ini:

No	Jenis>Nama Barang	Kecamatan	Kelurahan	Jumlah	Kondisi		
					Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1.	Tanah & Gedung	1	6	7	7	-	-
2.	Kendaraan Roda 4	4	8	12	12	-	-
3.	Kendaraan Roda 2	9	22	31	31	-	-
4.	Komputer	16	31	48	38	10	-
5.	Printer	26	28	54	49	8	-
6.	Mesin Ketik	6	-	6	6	-	-
7.	Televisi	2	2	4	4	-	-
8.	Pesawat Telepon	1	4	5	5	-	-



No	Jenis>Nama Barang	Kecamatan	Kelurahan	Jumlah	Kondisi		
					Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
9.	Faximile	1	2	3	3	-	-
10.	Filling Kabinet	14	22	36	36	-	-
11.	Almari Arsip	18	10	28	28	-	-
12.	Meja Kerja	31	38	69	69	-	-
13.	Kursi Kerja	44	18	62	62	-	-
14.	Kursi Rapat	150	130	280	280	-	-
15.	Kamera Digital	2	-	2	2	-	-
16.	LCD (proyektor)	1	1	2	2	-	-
17.	Laptop	7	-	7	7	-	-
18.	Kipas Angin	8	-	8	8	-	-
19.	Genset	1	-	1	1	-	-
20.	HT	12	22	34	34	-	-
21.	Kendaraan Roda 3	1	5	6	6	-	-
22.	Alat pemadam	3	2	5	5	-	-
23.	Dispenser	2	-	2	2	-	-
24.	Tangga	2	5	7	7	-	-
25.	Toa	1	4	5	5	-	-
26.	Kompas Gas +	2	-	2	2	-	-

Kantor Kecamatan dan Kelurahan dilengkapi dengan ruang pelayanan terpadu yang nyaman, ramah disabilitas, ruang laktasi, serta sarana pendukung protokol kesehatan. Dukungan jaringan internet (Wi-Fi) di setiap titik pelayanan dan penyediaan perangkat computer yang memadai untuk mendukung efisiensi birokrasi dan penggunaan Tanda Tangan Elektronik (TTE). Tersedianya kendaraan dinas (roda empat dan roda dua) yang berfungsi mendukung mobilitas aparatur dalam melakukan pembinaan wilayah, monitoring stunting, serta koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum (Trantibum).

1.6 Aspek Straregis dan Isu Strategis

A. Aspek Strategis

Dalam penyelenggaraan pembangunan, pemerintah bertindak mewakili kepentingan seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan dilaksanakan sendiri oleh masyarakat terdiri dari: tingkat mikro individu atau pribadi rakyat, tingkat agregat nasional dimulai dari tingkat



kelompok masyarakat, desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten- kota, provinsi sampai nasional dan tingkat global-internasional pembangunan antar negara dan bangsa.

Aspek strategis Kecamatan Rawalumbu pada tahun 2025 dijabarkan dalam dua tahapan, yaitu Penyelesaian Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026 fokus pada keberlanjutan program pembangunan pasca-transisi kepemimpinan, serta penyelerasan RPJMD 2025-2029, dimana proses adaptasi terhadap visi-misi baru Wali Kota terpilih yang menekankan transformasi ekonomi dan sosial.

Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2024-2026, aspek strategis organisasi difokuskan pada:

- a. Peningkatan Akuntabilitas dan Tata Kelola (Good Governance), secara internal aspek strategis ditekankan pada penguatan SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah), dan efektivitas penggunaan anggaran dalam satu tahun anggaran;
- b. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, upaya menyelaraskan waktu penyelesaian administrasi dengan Standar Oprasional Prosedur (SOP) yang ada, menyediakan layanan lebih dekat melalui Pelayanan Siaga On Area (Pesona) dengan menugaskan petugas Pamor di tiap RW, integrasi layanan aminduk dengan menggabungkan beberapa layanan administrasi kependudukan dalamsatu kali pemberian layanan seperti penerbitan Akte Kelahiran dan pembaharuan Kartu Keluarga;
- c. Peningkatan Ketertiban Umum, penanganan pedagang kaki lima atau penyandang masalah kesejahteraan soosial (PMKS) di jalur-jalur protokol.

Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2025-2029, aspek strategis organisasi berfokus pada:

- a. Optimalnya Pemberdayaan Masyarakat, keaktifan Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) dalam program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan untuk mendukung Pelayanan Publik di Kecamatan dalam rangka pengentasan kemiskinan,



pertumbuhan ekonomi dan penanganan stunting yang menjadi isu strategis Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kota Bekasi. LKM adalah lembaga akar rumput yang menjadi mitra utama Kecamatan. LKM memiliki keunggulan kedekatan emosional dan geografis dengan warga (pendekatan bottom-up);

- b. Peningkatan efektivitas pelayanan publik. Dalam penanganan stunting dan kemiskinan, pelayanan publik di tingkat Kecamatan berfungsi sebagai sistem pendukung.
 - i. Pelayanan publik memastikan warga miskin dan balita berisiko terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) agar mendapatkan bantuan sosial, (PKH, BPNT) dan layanan kesehatan gratis (PBI-JKN);
 - ii. Integrasi Layanan Adminduk: kemudahan pengurusan akta kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) yang bisa dilakukan secara bersamaan melalui Jumat Keren;
 - iii. Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan: memfasilitasi legalitas usaha (NIB) dan sertifikat halal bagi warga miskin yang merintis usaha kecil sebagai upaya peningkatan pendapatan keluarga;
 - iv. Penyelenggaraan Inovasi Rabu Pintar yang bekerjasama dengan STIE Tri Bhakti untuk mengadakan kursus tambahan pelajaran sekolah untuk siswa/i di wilayah Kecamatan Rawalumbu;
 - v. Penyelenggaraan Inovasi Rabu Patriot yang bekerjasama dengan Puskesmas Se-Kecamatan Rawalumbu dalam memberikan pelayanan kesehatan langsung on the spot kepada masyarakat yang bertempat di kantor rw.

Untuk melakukan pembahasan lebih lanjut secara komprehensif mengenai kinerja Kecamatan Rawalumbu tahun 2025 sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah dibuat, akan dibahas pada BAB III (Akuntabilitas Kinerja) pada laporan kinerja Kecamatan Rawalumbu Tahun 2025 ini.



B. Isu Strategis

Transisi perencanaan membawa tantangan tersendiri bagi Kecamatan Rawalumbu, diantaranya:

- a. Sinkronisasi Indikator Kinerja: adanya perubahan atau penyesuaian indikator kinerja utama (IKU) dari masa RPD ke RPJMD yang memerlukan adaptasi cepat dalam system pelaporan dan eksekusi di lapangan;
- b. Belum Optimalnya Integrasi Data Wilayah: masih terdapat fragmentasi data (seperti kemiskinan, UMKN, stunting) antar instansi yang menghambat akurasi pengambilan kebijakan di tingkat Kecamatan;
- c. Optimalisasi SDM Aparatur: Kebutuhan peningkatan kapasitas aparatur untuk memahami arah kebijakan baru dalam RPJMD 2025-2029, terutama terkait metodologi kerja yang lebih lincah dan berbasis digital;

C. Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi

Kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Rawalumbu pada tahun 2025 terdiri dari:

I. Belanja Langsung Urusan (BLU)

a) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Program ini direalisasikan melalui kegiatan dan sub kegiatan :

Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum

- Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum di Kecamatan Rawalumbu;
- Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Bojong Rawalumbu;



- Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Pengasinan;
- Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Bojong Menteng;
- Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Sepanjangjaya;

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan lain yang Dilimpahkan.

b) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program ini direalisasikan melalui kegiatan dan sub kegiatan :

Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan;
- Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
- Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bojong Rawalumbu;
- Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pengasinan;
- Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bojong Menteng;
- Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sepanjangjaya;
- Pembangunan Saranan dan Prasarana Kelurahan Bojong Rawalumbu;
- Pembangunan Saranan dan Prasarana Kelurahan Pengasinan;
- Pembangunan Saranan dan Prasarana Kelurahan Sepanjangjaya;



- Pembangunan Saranan dan Prasarana Kelurahan Bojong Menteng;
- Evaluasi Kelurahan.

Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

- Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat;
- Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Bojong Rawalumbu;
- Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Pengasinan;
- Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Bojong Menteng;
- Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Sepanjangjaya.

c) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program ini direalisasikan melalui kegiatan dan sub kegiatan :

Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

- Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.
- Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di Kecamatan Rawalumbu;
- Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di Kelurahan Bojong Rawalumbu;
- Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di Kelurahan Pengasinan;
- Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di Kelurahan Sepanjangjaya;
- Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di Kelurahan Bojong Menteng;



II. Belanja Langsung Penunjang Urusan (BLPU)

a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program ini direalisasikan melalui kegiatan dan sub kegiatan :

Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.

Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
- Fasilitas Kunjungan Tamu;
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
- Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.



Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi nya, Kecamatan Rawalumbu berkewajiban melayani seluruh masyarakat agar dapat memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam rangka pelayanan publik yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Jenis pelayanan di Kecamatan Rawalumbu terbagi ke dalam pelayanan dengan produk yang merupakan hasil dari Kecamatan Rawalumbu dan produk dimana Kecamatan Rawalumbu berperan dalam hal fasilitasi pelayanan.

Produk layanan yang merupakan hasil dari Kecamatan Rawalumbu adalah produk pelayanan yang berasal dari 5 seksi yang ada di Kecamatan Rawalumbu diantaranya :

1. Surat Keterangan Kesanggupan;
2. Surat Keterangan Waris;
3. Rekomendasi Nikah Non Muslim;
4. Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal Untuk Haji;
5. Surat Keterangan Domisili Yayasan;
6. Surat Keterangan Belum Menikah dan;
7. Surat Keterangan Tidak Mampu.

Sedangkan dalam mendukung pelayanan yang ada di dinas teknis terkait guna memangkas alur birokrasi yang rumit. Kecamatan



Rawalumbu bertugas memfasilitasi pelayanan kependudukan yang menjadi produk layanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil seperti : Pengantar Surat Pindah, Pencetakan Kart Identitas Anak (KIA), Perekaman dan Pencetakan e-KTP dan Akte Kelahiran.

Kecamatan Rawalumbu berkomitmen menyelenggarakan pelayanan publik dengan standar pelayanan prima kepada seluruh lapisan masyarakat di wilayah Kecamatan Rawalumbu dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kota Bekasi untuk menjadi kota yang cerdas, kreatif, maju, sejahtera dan ihsan.

1.7 Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian LKIP Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi Tahun 2025 mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 dan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 82 Tahun 2019 dengan susunan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan latar belakang; tugas, fungsi dan wewenang organisasi; aspek strategis organisasi; kegiatan dan layanan produk organisasi; serta sistematika penyajian

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menguraikan ringkasan dokumen perencanaan strategis organisasi dan Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Sub Bab ini menyajikan capaian kinerja organisasi secara umum

B. Analisis Capaian Kinerja

Bab ini menyajikan analisis capaian kinerja utama; analisis dan evaluasi capaian kinerja yang



menjelaskan untuk setiap Pernyataan Kinerja/Sasaran Strategis dengan menganalisis capaian kinerja sebagai berikut:

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- 2) Membandingkan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu atau beberapa tahun terakhir;
- 3) Membandingkan realisasi kerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Rencana Strategis;
- 4) Membandingkan kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
- 5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- 6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- 7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

C. Akuntabilitas Anggaran

Akuntabilitas keuangan dengan menguraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Didalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Perencanaan Kinerja pada Kecamatan Rawalumbu didasarkan atas Rencana Strategis Kecamatan Rawalumbu Tahun 2025-2029, Rencana Kerja Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja antara Wali Kota Bekasi dan Camat Rawalumbu Kota Bekasi dimana pada Perjanjian tersebut terdiri atas 2 (dua) sasaran strategis dengan 2 (dua) indikator kinerja sasaran. Indikator kinerja yang digunakan menyesuaikan dengan program/kegiatan tahun 2025, dengan target satuan berupa % (persen) sesuai dengan target yang ingin dicapai dari program/kegiatan.

2.1 Visi Misi RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029

Dalam rangka mendukung pencapaian target Pemerintah Kota Bekasi, Rencana Strategis Kecamatan Rawalumbu secara substansial mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD sebagai berikut:

Visi Kota Bekasi “**Kota Bekasi yang Nyaman dan Sejahtera**”

1. Kecamatan Rawalumbu berupaya mewujudkan Misi ke-1 yaitu :
“*Meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan publik perkotaan yang semakin memuaskan dengan didukung ketersediaan infrastruktur yang memadai*”. Dalam mewujudkan misi tersebut maka difokuskan pada Tujuan Kecamatan Rawalumbu, yaitu:
Tujuan 1: Terwujudnya tata Kota Bekasi yang berestetika disertai infrastruktur modern dan lestari.

Sasaran 1.1: Meningkatnya estetika kota di wilayah Kecamatan



Rawalumbu yang didukung oleh ketersediaan infrastruktur lokal yang modern.

2. Sejalan dengan upaya penguatan manajemen pemerintahan, Kecamatan Rawalumbu mendukung Misi ke-5, yaitu: *"Mengembangkan kolaborasi strategis dan dukungan penguatan manajemen pemerintahan kota yang mendorong Kota Bekasi sebagai kota bertaraf internasional yang keren"*. Dukungan ini difokuskan pada:

Tujuan 5: Terwujudnya Kota Bekasi cerdas disertai tata kelola pemerintahan modern dan inovatif.

Sasaran 5.1: Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima di tingkat kecamatan.

2.2 Rencana Strategis Kecamatan Rawalumbu

Pada Tahun 2025 terdapat peralihan dan penyesuaian terhadap target kinerja yang menjadi tanggungjawab Kecamatan Rawalumbu. Jika pada Renstra 2024-2026 fokus utamanya adalah peningkatan akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan, kualitas pelayanan publik, peningkatan ketertiban umum, maka pada Renstra 2025-2029, fokus dikembangkan pada peningkatan aktifitas Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) dalam mendukung pemberian layanan publik dan peningkatan efektivitas pelayanan publik di wilayah kecamatan. Pengembangan fokus dilakukan dalam rangka mendukung upaya pemerintah pusat dan Kota Bekasi dalam pengentasan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi dan penanganan stunting.

Perubahan tujuan dan sasaran tahun 2025 berdasarkan Renstra 2024-2026 ke Renstra 2025-2029 yang menyesuaikan perubahan pada RPD Tahun 2024-2026 ke RPJMD 2025-2029, seperti pada tabel dibawah ini:

Tabel 1 Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2024-2026



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Rawalumbu Tahun 2025

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN		TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE-		
					2024	2025	2026
1	2	3	4	5	7	8	9
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Dinamis, Inovatif dan Akuntabel di Kecamatan Rawalumbu		1	Capaian Nilai Zona Integritas (ZI)	37,35	37,65	37,85
		1.1 Meningkatnya Akuntabilitas dan Profesionalisme Pengelolaan dan Layanan Pemerintah	1.1.1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik	84,5	85	85,3
		1.2 Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Pemerintah	1.2.1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	75,4	75,5	76
2	Terwujudnya Kecamatan Rawalumbu yang Tertib dan Aman		1	Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban Umum	20%	25%	33%
		1.1 Terwujudnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat yang didukung oleh kohesi sosial yang kuat	1.1.1	Persentase Peningkatan Wilayah yang Tertib	20%	25%	33%

Tabel 2 Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA		BASELINE 2024	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE-				
					2025	2026	2027	2028	2029
2	3	4	5		10	11	12	13	14
Terwujudnya Estetika Kota disertai Infrastruktur Modern dan Kualitas Pelayanan Publik yang Prima di Kecamatan Rawalumbu		1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	83,2	83,65	84,15	84,7	85,45	86,35
	1.1 Meningkatnya LKM yang Mendukung Pelayanan Publik di Kecamatan Rawalumbu	1.1.1	Persentase LKM Aktif yang mendukung pelayanan publik	N/A	70%	75%	80%	85%	90%



TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA		BASELINE 2024	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE-				
					2025	2026	2027	2028	2029
	1.2 Meningkatnya Efektivitas Pelayanan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Rawalumbu	1.2.1	Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	0	0,54%	0,59%	0,65%	0,88%	1,04%

A. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Instansi Pemerintah. IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Dalam mengukur peningkatan kinerja di Kecamatan Rawalumbu digunakan Indikator Tujuan dan Sasaran sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat. Sedangkan untuk mengukur peningkatan layanan kepada masyarakat digunakan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik Berdasarkan UU Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik bahwa perlu upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dari penyalahgunaan wewenang pelayanan publik.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa Lembaga Keswadayaan Masyarakat memiliki tugas



dan fungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat, meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah kepada masyarakat dan menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat.

Untuk mengukur tingkat keberhasilan Kecamatan Rawalumbu dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka disusun Indikator Kinerja Utama (IKU) yang berfungsi sebagai alat ukur yang menunjukkan Tujuan, Sasaran, Indikator sampai dengan Program benar-benar memberikan dampak dan manfaat bagi masyarakat.

Berdasarkan Indikator Kinerja Utama yang telah ditentukan, berikut hasil yang telah didapatkan:

Tabel 3 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Rawalumbu Berdasarkan Renstra Tahun 2024-2026

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	PENJELASAN / RUMUS	PENANGGUNG JAWAB	TARGET TAHUN 2025
	1.1 Meningkatnya Akuntabilitas dan Profesionalisme Pengelolaan dan Layanan Pemerintah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik	Nilai	IKM dihitung berdasarkan hasil Survey Kepuasan Masyarakat / Survei Pelayanan Publik melalui kuesioner yang terdiri dari pertanyaan terkait kinerja dan aparatur organisasi dalam memberikan pelayanan yang diisi oleh penerima layanan sebagai responden.	-Seksi Ekbang -Seksi Pemerintahan -Seksi Pemberdayaan Masyarakat -Seksi Pentibum Kelurahan -Seksi Permasbang Kelurahan	85 Hasil Survey



**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kecamatan Rawalumbu
Tahun 2025**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	PENJELASAN / RUMUS	PENANGGUNG JAWAB	TARGET TAHUN 2025
	1.2 Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Pemerintah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai	Nilai AKIP = Laporan Hasil Laporan Evaluasi SAKIP	Sub Bagian Tata Usaha -Sub Bagian Keuangan -Seksi Pemerintahan -Seksi Trantib -Seksi Pemberdayaan Masyarakat -Seksi Pentibum Kelurahan -Seksi Permasbang Kelurahan -Seksi Kesos Kelurahan	75,5 Hasil Perhitungan
	1.1 Terwujudnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat yang didukung oleh kohesi sosial yang kuat	Persentase Peningkatan Wilayah yang Tertib	%	Jumlah zonasi yang telah ditertibkan / Jumlah zona tertib x 100%	-Seksi Kessos Kecamatan dan Kelurahan -Seksi Trantib	25% Hasil Perhitungan

Tabel 4 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Rawalumbu Berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	ALASAN	PENJELASAN / RUMUS	PENANGGUNG JAWAB	TARGET TAHUN 2025
1.1 Meningkatnya LKM yang Mendukung Pelayanan Publik di Kecamatan Rawalumbu	Persentase LKM Aktif yang mendukung pelayanan publik	Bedasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa	Persentase keaktifan dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah LKM yang memenuhi kriteria aktivitas tertentu dengan total jumlah LKM yang ada di Kecamatan Rawalumbu	-Sub Bagian Tata Usaha -Sub Bagian Keuangan -Seksi Ekbang -Seksi Pemerintahan -Seksi Trantib -Seksi Pemberdayaan Masyarakat -Seksi Pentibum Kelurahan -Seksi Permasbang Kelurahan -Seksi Kesos Kelurahan	70%



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Rawalumbu Tahun 2025

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	ALASAN	PENJELASAN / RUMUS	PENANGGUNG JAWAB	TARGET TAHUN 2025
1.2 Meningkatnya Efektivitas Pelayanan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Rawalumbu	Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	Bedasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik bahwa perlu upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik untuk memberikan perlindungan bagi setiap warga dalam penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Untuk mengetahui kinerja unit pelayanan perlu diukur melalui IKM.	Nilai IKM tahun N - Nilai IKM tahun (N1)/Nilai IKM tahun (n-1) x 100%	-Seksi Ekbang -Seksi Pemerintahan -Seksi Pemberdayaan Masyarakat -Seksi Pentibum Kelurahan -Seksi Permasbang Kelurahan	0,54%



2.3 Perjanjian Kinerja

Dokumen Renstra selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan (Renja) yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran. Selanjutnya renja tersebut dijadikan acuan dalam penyusunan perjanjian kinerja. Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus Perjanjian Kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah selain itu dapat pula digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

Perjanjian Kinerja Kecamatan Rawalumbu Tahun 2025 merupakan target kinerja dari Renstra Kecamatan Rawalumbu 2025-2029, yang memuat sasaran strategis Indikator Kinerja yang terkait dengan tugas fungsi Kecamatan Rawalumbu. Selanjutnya target kinerja tersebut dijabarkan dalam target per triwulan sebagai bahan evaluasi per triwulan. Berikut adalah sasaran kinerja, indikator dan target yang akan dicapai dalam Perjanjian Kinerja (Tabel 2.2.1) beserta Alokasi Anggaran per triwulan (Tabel 2.2.2) :



**Tabel 5 Perjanjian Kinerja Kecamatan Rawalumbu Tahun 2025
Sebelum Perubahan**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Profesionalisme Pengelolaan dan Layanan Pemerintah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik	85
2.	Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Pemerintah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	75,5
3.	Terwujudnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat yang didukung oleh kohesi sosial yang kuat	Persentase Peningkatan Wilayah yang Tertib	25%

**Tabel 6 Perjanjian Kinerja Kecamatan Rawalumbu Tahun 2025
Setelah Perubahan**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya LKM yang Mendukung Pelayanan Publik di Kecamatan Rawalumbu	Persentase LKM Aktif yang mendukung pelayanan publik	70%
2.	Meningkatnya Efektivitas Pelayanan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Rawalumbu	Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	0,54%



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kecamatan Rawalumbu
Tahun 2025

Tabel 7 Alokasi Anggaran Per Triwulan

No	Nama Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Alokasi				Ket.
			Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.000.000	4.000.000	-	-	11.000.000	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD	12.745.000	2.450.000	2.800.000	3.440.000	4.055.000	
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.057.948.000	3.403.441.900	3.876.546.900	2.907.410.175	4.870.549.025	
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.000	-	-	1.150.000	3.850.000	
5	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	6.375.000	-	-	-	6.375.000	
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30.000.000	-	30.000.000	-	-	
7	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	244.275.000	180.957.000	53.816.000	4.749.000	4.753.000	
8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.000.000	5.000.000	7.500.000	7.500.000	10.000.000	
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20.000.000	4.800.000	5.200.000	4.800.000	5.200.000	
10	Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	-	-	-	
11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	167.175.000	20.617.000	38.316.000	37.618.000	70.624.000	
12	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	25.000.000	-	-	-	25.000.000	
13	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	37.536.000	37.242.000	-	-	294.000	
14	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	350.000.000	79.998.000	109.998.000	79.998.000	80.006.000	



**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kecamatan Rawalumbu
Tahun 2025**

No	Nama Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Alokasi				Ket.
			Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
15	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.709.516.390	2.444.667.810	2.121.192.810	567.704.883	575.950.887	
16	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	92.245.000	16.790.800	29.331.600	16.790.800	29.331.800	
17	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	165.000.000	29.916.000	51.082.000	34.916.000	49.086.000	
18	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	42.605.000	9.401.250	12.401.250	10.401.250	10.401.250	
19	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200.000.000	200.000.000	-	-	-	
20	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	30.000.000	16.792.300	4.403.100	4.403.100	4.401.500	
21	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	25.000.000	-	25.000.000	-	-	
22	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100.000.000	85.380.000	-	-	14.620.000	
23	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	101.790.000	7.539.000	43.935.000	28.737.000	21.579.000	
24	Evaluasi Kelurahan	34.263.000	34.263.000	-	-	-	
25	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	50.000.000	-	-	50.000.000	-	



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kecamatan Rawalumbu
Tahun 2025

No	Nama Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Alokasi				Ket.
			Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
26	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	50.000.000	12.578.000	12.474.000	12.474.000	12.474.000	
27	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	235.440.275	28.645.000	19.910.000	165.240.000	21.645.275	
28	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	50.000.000	10.461.500	14.723.500	14.353.500	10.461.500	
29	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Kel. Bojong Rawalumbu)	30.000.000	2.467.500	12.556.500	7.402.500	7.573.500	
30	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kel. Bojong Rawalumbu)	200.000.000	-	-	-	200.000.000	
31	Pemberdayaan Kelurahan (Kel. Bojong Rawalumbu)	7.789.574.000	782.988.000	965.118.000	785.118.000	5.256.350.000	
32	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kel. Bojong Rawalumbu)	40.000.000	20.000.000	20.000.000	-	-	
33	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Kel. Bojong Rawalumbu)	360.000.000	90.000.000	90.000.000	90.000.000	90.000.000	
34	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Kel. Bojong Menteng)	25.000.000	-	13.250.000	11.697.000	53.000	
35	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kel. Bojong Menteng)	200.000.000	-	-	-	200.000.000	



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kecamatan Rawalumbu
Tahun 2025

No	Nama Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Alokasi				Ket.
			Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
36	Pemberdayaan Kelurahan (Kel. Bojong Menteng)	2.525.798.000	236.925.000	346.174.000	326.174.000	1.616.525.000	
37	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kel. Bojong Menteng)	40.000.000	-	20.000.000	20.000.000	-	
38	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Kel. Bojong Menteng)	245.730.000	52.500.000	66.700.000	66.700.000	59.830.000	
39	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Kel. Pengasinan)	15.000.000	-	5.964.000	8.946.000	90.000	
40	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kel. Pengasinan)	200.000.000	-	-	-	200.000.000	
41	Pemberdayaan Kelurahan (Kel. Pengasinan)	5.485.485.600	520.598.400	711.860.400	540.567.400	3.712.459.400	
42	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kel. Pengasinan)	40.000.000	20.000.000	-	20.000.000	-	
43	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Kel. Pengasinan)	276.000.000	69.000.000	69.000.000	69.000.000	69.000.000	
44	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Kel. Sepanjang Jaya)	26.432.000	-	10.248.000	16.184.000	-	
45	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kel. Sepanjang Jaya)	200.000.000	-	-	-	200.000.000	



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kecamatan Rawalumbu
Tahun 2025

No	Nama Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Alokasi				Ket.
			Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
46	Pemberdayaan Kelurahan (Kel. Sepanjang Jaya)	2.520.320.800	232.936.200	245.148.200	431.963.200	1.610.273.200	
47	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kel. Sepanjang Jaya)	40.000.000	-	20.000.000	20.000.000	-	
48	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Kel. Sepanjang Jaya)	162.000.000	40.500.000	40.500.000	40.500.000	40.500.000	
TOTAL		43.308.254.065	8.702.855.660	9.095.149.260	6.405.937.808	19.104.311.337	



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja dalam format Laporan Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Rawalumbu tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja dan Penetapan Kinerja (PK) Kecamatan Rawalumbu, yang tidak terlepas dari pelaksanaan pembangunan itu sendiri sebagai fungsi *Actuating* dari berbagai piranti perencanaan yang sudah dibuat tersebut, hingga kemudian sampailah pada saat pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan yang mengerahkan seluruh sumber daya manajemen pendukungnya.

Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur, terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurannya, pertanggungjawaban pengukuran yang diukur adalah kegiatan, program dan sasaran yang prosesnya adalah sejauh mana kegiatan, program dan sasaran dilaksanakan tidak salah arah dengan berbagai piranti perencanaan yang telah dibuat.

Pengukuran Kinerja merupakan bentuk penilaian yang dilakukan terhadap keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Rawalumbu yang dilaksanakan Tahun 2025. Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja, Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*).

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja yang telah dicapai Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi selama tahun 2025, berupa pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi tahun 2025-2029 serta perjanjian kinerja



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Rawalumbu Tahun 2025

Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi tahun 2025 sebanyak 2 (dua) sasaran strategis dan 2 (dua) indikator kinerja yang semua indikatornya mencapai target yang telah ditetapkan.

Capaian setiap sasaran strategis beserta dengan indikator kinerjanya dan analisis serta perbandingan dari setiap capaian sasaran strategis dapat dilihat pada tabel pengukuran kinerja sebagai berikut:

Tabel 8 Capaian Kinerja Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Meningkatnya LKM yang Mendukung Pelayanan Publik di Kecamatan Rawalumbu	Persentase LKM Aktif yang mendukung pelayanan publik	%	70%	100%	100%
2	Meningkatnya Efektivitas Pelayanan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Rawalumbu	Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	%	0,54%	6,67	107,25%

Sumber : Data Olahan Sub Bagian Tata Usaha Kecamatan Rawalumbu, 2025

Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2025 berdasarkan Renstra Kecamatan Rawalumbu Tahun 2025-2029 dimana telah ditetapkan 2 (dua) Sasaran Strategis dengan 2 (dua) Indikator Kinerja. Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk mencapai sasaran startegis yaitu :

1. Meningkatnya LKM yang Mendukung Pelayanan Publik di Kecamatan Rawalumbu, diukur melalui indikator yaitu : Persentase LKM Aktif yang mendukung pelayanan publik dengan capaian kinerja sebesar 100%;
2. Meningkatnya Efektivitas Pelayanan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Rawalumbu diukur melalui indikator yaitu Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan dengan capaian kinerja sebesar 107,25%.



Dengan melihat 2 (dua) indikator untuk mengukur 2 (dua) sasaran strategis dimana seluruh indikator tercapai/terlampau maka capaian indikator kinerja tersebut semestinya mendukung kepada ketercapaian indikator tujuan Kecamatan Rawalumbu dalam Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik.

3.2. Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama

Sasaran Strategis 1: Meningkatnya LKM yang Mendukung Pelayanan Publik di Kecamatan Rawalumbu

3.2.1 Persentase LKM Aktif yang Mendukung Pelayanan Publik.



a. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Target Kinerja Tahun ini

Dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa yang merupakan penjabaran dari amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menekankan pada penguatan partisipasi masyarakat dan tata kelola pemerintahan desa yang baik, oleh karena itu capaian indikator ini tidak hanya sekadar administratif, tetapi mencerminkan keberhasilan pemerintah



daerah (kabupaten/kota) dalam mendorong pemerintahan desa yang partisipatif, demokratis, dan efektif. Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) menjadi Wadah partisipasi masyarakat desa yang dibentuk melalui musyawarah dan mufakat untuk menampung dan mewujudkan aspirasi, kebutuhan, dan kepentingan masyarakat di bidang pembangunan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

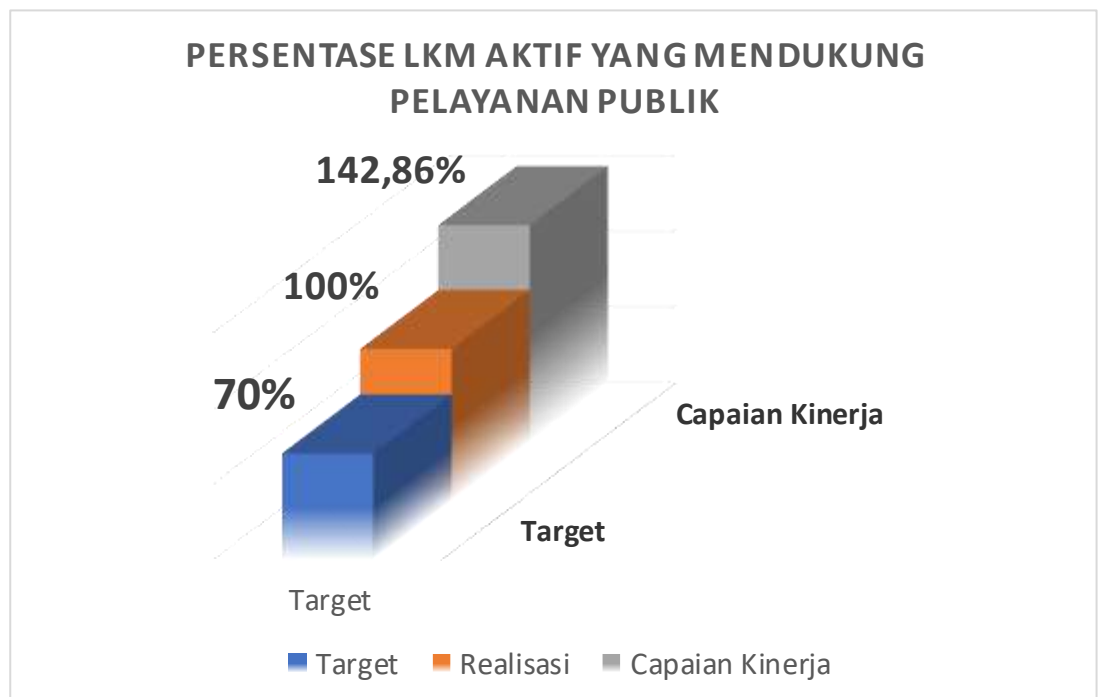
LKM yang memenuhi kriteria minimal aktivitas dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan perannya sebagaimana diatur dalam Permendagri 18/2018 dan Peraturan Desa. Kriteria keaktifan biasanya meliputi :

1. Kelembagaan : Memiliki pengurus yang sah dan masih berlaku berdasarkan Surat Keputusan (SK).
2. Administratif : Melaksanakan administrasi sederhana dan pencatatan kegiatan yang dibuktikan dengan laporan bulanan dan tahunan.
3. Partisipatif : Melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.
4. Pelaporan : Menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengurus secara periodic kepada Lurah dan Camat.

Melalui Capaian Persentase LKM Aktif yang mendukung pelayanan publik diharapkan semua Lembaga Keswadayaan Masyarakat di Kecamatan Rawalumbu dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap proses pembangunan dan partisipasi masyarakat dalam mendukung pelayanan publik yang ada di Kecamatan Rawalumbu.



Tabel 9 Analisis Capaian Indikator Kinerja Persentase LKM Aktif yang mendukung pelayanan publik



Dengan melihat tabel tersebut diatas bahwa target Persentase LKM Aktif yang mendukung pelayanan publik pada tahun 2025 sebesar 70%, sementara realisasi mencapai 100%, maka capaian kinerja tahun 2025 atas indikator Persentase LKM Aktif yang mendukung pelayanan publik sebesar 142,86%, maka capaian indikator Persentase LKM Aktif yang mendukung pelayanan publik pada Tahun 2025 telah melebihi target yang telah ditetapkan.

Dalam mengukur kinerja Persentase LKM Aktif yang mendukung pelayanan publik, digunakan indikator Laporan LKM yang disampaikan kepada Kelurahan dan Kecamatan yang dihitung dengan formulasi sebagai berikut :

Persentase LKM Aktif yang mendukung pelayanan publik = Jumlah LKM Aktif yang mendukung pelayanan Publik/Jumlah Total LKM x 100%



b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Untuk meraih capaian kinerja pada indikator sasaran Persentase LKM Aktif yang mendukung pelayanan publik pada Kecamatan Rawalumbu, tentunya didukung oleh capaian kinerja indikator program yang mendukung Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Rawalumbu, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 10 Indikator Capaian Kegiatan Pendukung Indikator Kinerja Utama Persentase LKM Aktif yang mendukung pelayanan publik

No	Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian Kinerja Tahun 2025
1	Persentase LKM yang aktif	Nilai	-	-	-	70%	100%	142,86%

Sumber : Data Kecamatan Rawalumbu Tahun 2025, diolah

Dengan melihat indikator kegiatan pada tahun 2025 telah melebihi target, maka berpengaruh pada tingkat ketercapaian indikator sasaran Persentase LKM Aktif yang mendukung pelayanan publik di Kecamatan Rawalumbu di tahun 2025, dikarenakan indikator kinerja utama pada Tahun 2025 telah disesuaikan dengan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 maka belum ada perbandingan pada tahun sebelumnya.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Rencana Strategis Tahun 2025-2029

Capaian indikator sasaran Persentase LKM Aktif yang mendukung pelayanan publik tahun 2025 jika dikaitkan dengan target Renstra Kecamatan Rawalumbu Tahun 2025-2029 pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 11 Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Persentase LKM Aktif yang mendukung pelayanan publik di Kecamatan Rawalumbu Target Renstra 2025-2029

Capaian Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Meningkatnya LKM yang Mendukung Pelayanan Publik di Kecamatan Rawalumbu	
		2025	2029
Target	Persen	70%	90%
Realisasi	Persen	100%	-

Sumber : Data Olahan Sub Bagian Tata Usaha Kecamatan Rawalumbu Tahun 2025

Jika melihat tabel diatas, realisasi indikator Persentase LKM Aktif yang mendukung pelayanan publik pada tahun 2025 sebesar 100% dibandingkan dengan target Renstra Kecamatan Rawalumbu Tahun 2025-2029 sebesar 90%, maka Kecamatan Rawalumbu harus dapat meningkatkan capaian kinerjanya ke depan. Dengan demikian kedepan harus ada langkah-langkah konkrit dari Kecamatan Rawalumbu untuk meningkatkan capaian kinerja Meningkatkan LKM yang Mendukung Pelayanan Publik di Kecamatan Rawalumbu, diantaranya:

a. Pemetaan dan Validasi LKM

Menginventarisasi seluruh LKM yang ada di Kelurahan berdasarkan klasifikasi aktif, kurang aktif dan tidak aktif;

b. Penguatan Kelembagaan LKM

Melakukan pembinaan terhadap manajemen organisasi yang meliputi tata Kelola, administrasi dan pelaporan serta mendorong regenerasi kepengurusan agar tidak stagnan;

c. Sinkronisasi Program dengan Pelayanan Publik

Melibatkan seluruh LKM dalam program pemerintah dalam musrenbang kelurahan dan kecamatan untuk menetapkan peran konkret LKM dalam pendampingan warga dan pengelolaan kegiatan;



d. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi

Dalam hal ini Kecamatan Rawalumbu harus menyelenggarakan pelatihan tematik mengenai pelayanan public berbasis masyarakat serta pengelolaan dana swadaya masyarakat ataupun dana bantuan dari pemerintah;

e. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Berkala

Menetapkan indikator keaktifan LKM berdasarkan jumlah kegiatan, keterlibatan dalam pelayanan publik dan laporan dengan melakukan monitoring triwulanan oleh kecamatan dan kelurahan sebagai bukti dukung capaian indikator kinerja.

d. Analisa Penyebab Keberhasilan Serta Faktor Permasalahan

Analisa penyebab keberhasilan serta peningkatan kinerja indikator Persentase LKM aktif yang mendukung pelayanan publik di Kecamatan Rawalumbu dapat diuraikan sebagai berikut:

Adapun faktor tercapainya target Persentase LKM Aktif yang mendukung pelayanan publik di Tahun 2025 dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain :

1. Partisipasi Masyarakat yang Tinggi

Masyarakat di Kecamatan Rawalumbu memiliki tingkat kepedulian dan partisipasi yang cukup baik terhadap kegiatan kemasyarakatan. Hal ini mendorong LKM untuk tetap aktif dalam mendukung pelayanan publik, seperti kegiatan sosial, lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat;

2. Dukungan Kecamatan dan Kelurahan

Adanya pembinaan, fasilitasi, serta koordinasi yang dilakukan oleh pihak kecamatan dan kelurahan berperan penting dalam menjaga keberlangsungan dan keaktifan



LKM. Dukungan ini mencakup pendampingan administrasi, kegiatan koordinasi rutin, serta pelibatan LKM dalam program-program pemerintah;

3. Sinergi dengan Program Pembangunan Daerah

LKM yang aktif mampu menyesuaikan program dan kegiatannya dengan prioritas pembangunan daerah, sehingga keberadaannya dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat dan pemerintah setempat;

4. Penurunan Stunting

Data by name by address dari posyandu memastikan intervensi gizi tepat sasaran pada balita beresiko, kader PKK berperan sebagai fasilitator di tingkat keluarga yang mendorong kemandirian pangan di tingkat keluarga;

5. Pengentasan Kemiskinan

Validasi faktual dari RT/RW dan BKM meminimalisir kesalahan sasaran penerima manfaat bantuan sosial. Kemudian pengelolaan sampah di tingkat RW melibatkan warga lokal (sering kali kelompok masyarakat berpenghasilan rendah) sebagai petugas kebersihan atau pengelola Bank Sampah yang dibayar melalui iuran swadaya yang di kelola secara lebih professional berkat dukungan infrastruktur dana hibah.

Adapun yang menjadi faktor permasalahan / Penghambat antara lain :

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Tidak semua LKM memiliki jumlah dan kualitas pengurus yang memadai. Pergantian pengurus, rendahnya kapasitas manajerial, serta kurangnya regenerasi menjadi kendala dalam menjaga keaktifan lembaga;



2. Kurangnya Pemahaman terhadap Tugas dan Fungsi LKM

Masih terdapat LKM yang belum sepenuhnya memahami peran strategisnya dalam mendukung pelayanan publik, sehingga aktivitas lembaga menjadi tidak maksimal atau bersifat pasif;

3. Tingkat Partisipasi Masyarakat yang Fluktuatif

Kesibukan masyarakat dan perbedaan tingkat kepedulian sosial di masing-masing wilayah dapat memengaruhi keterlibatan warga dalam kegiatan LKM, yang pada akhirnya berdampak pada keaktifan lembaga.

e. Analisa Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Keberhasilan pencapaian suatu sasaran strategis tidak terlepas dari adanya Program dan Kegiatan yang relevan untuk mengungkit pencapaian sasaran strategis, adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama Persentase LKM Aktif yang Mendukung Pelayanan Publik di Kecamatan Rawalumbu Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 12 Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Untuk Indikator Kinerja Sasaran Persentase LKM Aktif yang Mendukung Pelayanan Publik di Kecamatan Rawalumbu

Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rp.	Realisasi Anggaran		Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
			Rp	(%)		
Persentase LKM Aktif yang mendukung pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	19.567.231.400,00	19.452.363.728,00	99,41%	93,75%	5,66%
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	19.357.231.400,00	19.245.964.301,00	99,43%	90,91%	8,52%
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100.000.000,00	97.779.326,00	97,78%	100,00%	2,22%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00%	100,00%	0,00%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00%	100,00%	0,00%



**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kecamatan Rawalumbu
Tahun 2025**

Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rp.	Realisasi Anggaran		Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00%	100,00%	0,00%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00%	100,00%	0,00%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	101.790.000,00	84.805.775,00	83,31%	100,00%	16,69%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5.485.485.600,00	5.472.734.000,00	99,77%	100,00%	0,23%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7.789.574.000,00	7.748.618.400,00	99,47%	100,00%	0,53%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2.520.320.800,00	2.518.751.800,00	99,94%	100,00%	0,06%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2.525.798.000,00	2.523.275.000,00	99,90%	100,00%	0,10%
	Evaluasi Kelurahan	34.263.000,00	0	0,00%	0,00%	100,00%
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	210.000.000,00	206.399.427,00	98,29%	100,00%	1,71%
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00%	100,00%	0
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00%	100,00%	0
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00%	100,00%	0
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00%	100,00%	0
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	50.000.000,00	46.399.427,00	92,80%	100,00%	7,20%
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.279.170.275,00	1.268.108.121,00	99,14%	100,00%	0,86%
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1.279.170.275,00	1.268.108.121,00	99,14%	100,00%	0,86%
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	276.000.000,00	276.000.000,00	100,00%	100,00%	0,00%
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	360.000.000,00	354.000.000,00	98,33%	100,00%	1,67%
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	162.000.000,00	162.000.000,00	100,00%	100,00%	0,00%
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	245.730.000,00	244.500.000,00	99,50%	100,00%	0,50%
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	235.440.275,00	231.608.121,00	98,37%	100,00%	1,63%
	Total	20.846.401.675,00	20.720.471.849,00	99,40%	95,24%	4,16%

Sumber : Aplikasi siencang.bekasikota.go.id Tahun 2025



Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa terdapat 2 (dua) program, 3 (tiga) kegiatan dan 21 (dua puluh satu) Sub Kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama Persentase LKM Aktif yang mendukung pelayanan publik, dengan anggaran sebesar **Rp. 20.846.401.675 (dua puluh milyar delapan ratus empat puluh enam juta empat ratus satu ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah)** tingkat realisasi anggaran sebesar **Rp. 20.720.471.849** dengan persentase realisasi anggaran sebesar 99,40%, yang terbagi Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan sebesar **Rp. 19.567.231.400 (Sembilan belas milyar lima ratus enam puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh satu ribu empat ratus rupiah)** tingkat realisasi anggaran sebesar **Rp. 19.452.363.728** dengan persentase sebesar 99,41%.

Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar Rp. **1.279.170.275 (satu milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta seratus tujuh puluh ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah)** tingkat realisasi anggaran sebesar **Rp. 1.268.108.121** dengan persentase sebesar 99,14%.

Jika dikaitkan dengan capaian realisasi Indikator Kinerja Utama Persentase LKM Aktif yang mendukung pelayanan publik sebesar 100% dari target nilai sebesar 70% atau dengan capaian kinerja hanya sebesar 142,86%, pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dan Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tahun 2025 tidak dilakukan refocusing anggaran dikarenakan demi menunjang sarana dan prasarana untuk meningkatkan kenyamanan masyarakat. Akan tetapi terdapat Efisiensi Anggaran yang mencapai 9,14% pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, 0,51% pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan serta 13,98% pada Program Penyelenggaraan urusan



Pemerintahan Umum yang dimana pada 3 program tersebut keterlibatan masyarakat dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan cukup signifikan sehingga anggaran yang dialokasikan tidak terserap 100%.

f. Analisa Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pencapaian di atas juga tidak lepas dari efisiensi penggunaan sumber daya, berikut analisisnya:

1. Efisiensi Anggaran

Pencapaian ini menggunakan prinsip Konvergensi Anggaran, yaitu penggabungan berbagai sumber dana untuk satu tujuan yang sama, dimana Dana Kelurahan digunakan untuk membiayai kegiatan operasional LKM secara tepat sasaran, sehingga tidak terjadi tumpang tindih dari Dinas terkait (seperti Dinas Kesehatan untuk stunting);

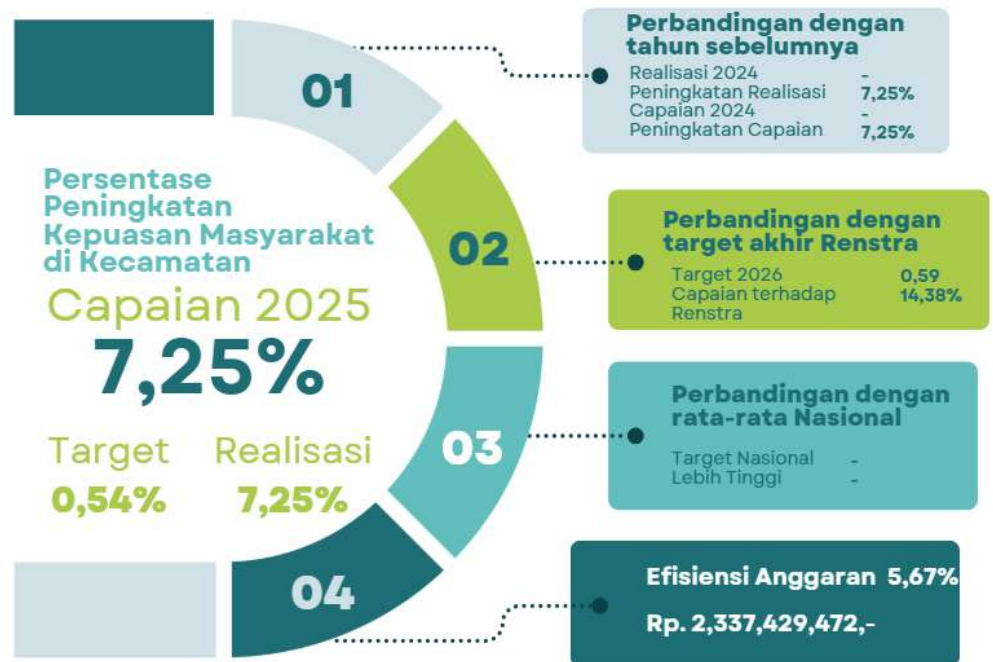
2. Efisiensi Sumber Daya Manusia

Kecamatan Rawalumbu tidak menambah jumlah pegawai birokrasi, melainkan mengoptimalkan aparatur yang ada melalui LKM. Dengan mengaktifkan 100% LKM (RT, RW, PKK, LPM, BKM), pemerintah mendapatkan “tenaga kerja” tambahan tanpa membebani penambahan gaji ASN. Insentif yang diberikan kepada pengurus LKM jauh lebih efisien dibandingkan biaya operasional jika pekerja lapangan dilakukan oleh pihak ketiga atau tim survei professional. Kader PKK atau Posyandu tidak hanya focus pada Kesehatan (stunting), tetapi juga dilibatkan dalam pendataan kemiskinan dan UMKN. Ini Adalah efisiensi peran, dimana satu orang bisa menjalankan beberapa fungsi intervensi sekaligus.



3.2.2 Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan

Persentase peningkatan kepuasan masyarakat di Kecamatan Rawalumbu adalah sebuah indikator kuantitatif yang mengukur seberapa besar kenaikan tingkat kepuasan warga terhadap pelayanan publik dan kondisi lingkungan dalam periode waktu tertentu.



a. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Target Kinerja Tahun ini

Pada tahun 2025, terjadi perubahan mendasar dalam cara pengukuran kinerja pelayanan publik. Jika pada tahun-tahun sebelumnya fokus utama hanya pada pencapaian nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) secara absolut, maka pada periode Renstra 2025-2029, indikator dipertajam menjadi Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan. Perubahan ini dilakukan untuk menciptakan budaya kerja yang dinamis. Dengan menargetkan "peningkatan", aparatur Kecamatan Medansatria dituntut untuk tidak sekadar mempertahankan standar yang ada, melainkan terus melakukan inovasi dan perbaikan kualitas



layanan dari waktu ke waktu. Hasil perhitungan Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan tahun 2025 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 13 Perhitungan Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat

Data Pendukung	Realisasi Tahun 2024 (N-1)	Realisasi Tahun 2025 (N)	Persentase Peningkatan
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Rawalumbu	83,20	89,23	7,25

Dari tabel di atas, terlihat adanya kenaikan nilai IKM dari 84,87 menjadi 86,20. Secara matematis, hal ini menghasilkan realisasi peningkatan sebesar 7,25%, jauh melampaui rata-rata pertumbuhan historis yang diproyeksikan. Dengan realisasi sebesar 7,25% maka persentase capaian terhadap target dapat dihitung sebagai berikut:

Tabel 14 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Indikator Utama	Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Capaian 2025
Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	0,54%	7,25%	1219,77%

Penetapan target 0,54% untuk indikator Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat pada tahun 2025 tidak ditentukan secara acak. Angka ini merupakan hasil kalkulasi teknis yang didasarkan pada rata-rata kenaikan nilai IKM Kecamatan Rawalumbu selama beberapa tahun sebelumnya. Berdasarkan tren historis, kenaikan nilai kepuasan masyarakat biasanya bergerak secara linier dan perlahan. Target 0,54%



mencerminkan proyeksi pertumbuhan "normal" atau moderat jika Kecamatan menjalankan pelayanan secara rutin seperti tahun-tahun lalu. Namun, dengan realisasi mencapai 7,25%, hal ini membuktikan bahwa strategi yang diterapkan pada tahun 2025 berhasil mematahkan tren linier tersebut. Pencapaian yang melampaui rata-rata historis ini menegaskan bahwa kombinasi antara beberapa inovasi unggulan Kecamatan Rawalumbu yaitu Jum'at Keren, Rabu Pintar dan Rabu Patriot masifnya sosialisasi melalui Instagram dan brosur, serta kemudahan akses SOP dan kontak pengaduan di website, telah menciptakan lompatan kualitas (aspek akselerasi) yang jauh lebih efektif dibandingkan pola pelayanan di tahun-tahun sebelumnya.

b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Realisasi kinerja tahun ini jika dibandingkan dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 15 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan dengan Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025
1	Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat diKecamatan	Nilai	-	-	0,54%	7,25%

Berdasarkan data pada Tabel diatas, terlihat adanya tren positif dalam hal pelayanan kepada warga di Kecamatan Rawalumbu. Meskipun cara pengukuran (indikator) mengalami penyesuaian pada tahun 2025, namun sumber datanya tetap konsisten menggunakan hasil Survei Kepuasan Masyarakat



(SKM). Pada tahun 2023 dan 2024, performa pelayanan diukur menggunakan angka indeks. Dalam dua tahun tersebut, Kecamatan Rawalumbu selalu berhasil melampaui target yang ditetapkan.

Angka realisasi sebesar 7.25% ini merupakan "lompatan" yang sangat signifikan bagi Kecamatan Rawalumbu. Artinya, upaya percepatan (akselerasi) pelayanan serta masifnya inovasi yang dilakukan pada tahun 2025 memberikan dampak nyata yang dirasakan masyarakat.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Rencana Strategis Tahun 2025-2029

Capaian indikator sasaran Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat tahun 2025 jika dikaitkan dengan target Renstra Kecamatan Rawalumbu Tahun 2025-2029 pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 16 Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Rawalumbu Target Renstra 2025-2029

Capaian Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Rawalumbu	
		2025	2029
Target	Persen	0,54%	1,04%
Realisasi	Persen	7,25%	-

Capaian 7,25% ini membuktikan bahwa inovasi pelayanan yang proaktif, terjangkau, dan menyelesaikan masalah langsung di akar rumput secara signifikan dapat meningkatkan kualitas hidup dan kepuasan warga. Ketiga program tersebut berhasil menjawab kebutuhan pokok masyarakat akan pelayanan administrasi, pendidikan, dan kesehatan, sehingga langsung



dirasakan manfaatnya dan terefleksi dalam lonjakan angka kepuasan yang jauh melampaui ekspektasi.

d. Analisa Penyebab Keberhasilan Serta Faktor Permasalahan

Analisa penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif Solusi yang dilakukan untuk dapat mendukung capaian Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Rawalumbu Adalah sebagai berikut:

1. Inovasi Program yang tepat Sasaran

Jum'at Keren menyasar kebutuhan dasar administrasi yang sering dikeluhkan (birokrasi lambat, antrian panjang). Solusi ini langsung mengurangi "pain point" warga.

Rabu Pintar menjawab kebutuhan pendidikan tambahan yang mahal di luar sekolah, sehingga mendapat apresiasi tinggi dari orang tua dan siswa.

Rabu Patriot mendekatkan layanan kesehatan ke warga, terutama lansia dan kelompok kurang mampu, yang kesulitan akses ke fasilitas kesehatan formal.

2. Pendekata "Jemput Bola"

Program tidak menunggu warga datang ke kantor, tetapi hadir di tengah masyarakat (seperti di kantor RW/RT). Hal ini meningkatkan aksesibilitas dan persepsi kepedulian pemerintah terhadap masyarakat.

3. Konvergensi Layanan Multi-Sektor

Ketiga program mencakup sosial, pendidikan, dan Kesehatan adalah tiga aspek utama kualitas hidup. Hal ini memperluas dampak dan menjangkau berbagai segmen masyarakat.

Adapun faktor permasalahan/penghambat keberhasilan yang telah atau mungkin terjadi antara lain:



1. Keberlanjutan (***Sustainability***)

Ketergantungan pada SDM dan Dana: Program inovatif sering bergantung pada semangat beberapa pegawai dan anggaran khusus. Jika tidak diinstitusionalisasi, bisa mandek saat ada rotasi pegawai atau pemotongan anggaran.

Kejenuhan Warga bisa menjadi penyebab penurunan partisipasi apabila pelayanan tidak berkembang atau stagnan.

2. Kapasitas Beban Kerja

Penambahan program tanpa penambahan SDM dapat menyebabkan kelebihan beban kerja pegawai kecamatan, berpotensi menurunkan kualitas layanan utama lainnya.

3. Minimnya Standarisasi dan Replikasi

Keberhasilan sangat bergantung pada individu penggerak di Kecamatan Rawalumbu. Tanpa standar operasional prosedur (SOP) yang terdokumentasi, program sulit direplikasi di kecamatan lain atau dipertahankan jika pimpinan berganti.

Adapun rekomendasi untuk keberlanjutan program inovasi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat antara lain menjadikan program Inovasi yang ada sebagai program unggulan di Kecamatan Rawalumbu dengan membuat SOP, mengalokasikan anggaran, menetapkan indikator program kerja pada Rencana Strategis Kecamatan Rawalumbu.

Keberhasilan yang telah dijelaskan diatas menunjukkan bahwa peningkatan kepuasan masyarakat dapat melonjak signifikan ketika intervensi pemerintah bersifat langsung, nyata, dan multidimensi. Namun, tanpa strategi keberlanjutan yang matang, capaian ini berisiko hanya menjadi success story



temporer. Kunci berikutnya adalah mengubah inovasi yang digerakkan oleh individu menjadi sistem yang tertanam dalam budaya organisasi pada Kecamatan Rawalumbu.

e. Analisa Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Keberhasilan pencapaian suatu sasaran strategis tidak terlepas dari adanya Program dan Kegiatan yang relevan untuk mengungkit pencapaian sasaran strategis, adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama Persentase Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Rawalumbu Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 17 Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Untuk Indikator Kinerja Sasaran Persentase LKM Aktif yang Mendukung Pelayanan Publik di Kecamatan Rawalumbu

Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rp.	Realisasi Anggaran		Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
			Rp	(%)		
Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	22.210.924.390	19.893.332.530	89,57%	94,74%	5,17%
	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	27.745.000	26.509.000	95,55%	100,00%	4,45%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.000.000	14.308.000	95,39%	100,00%	4,61%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12.745.000	12.201.000	95,73%	100,00%	4,27%
	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	15.062.948.000	13.249.768.196	87,96%	100,00%	12,04%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.057.948.000	13.245.038.196	87,96%	100,00%	12,04%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.000	4.730.000	94,60%	100,00%	5,40%
	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	6.375.000	5.000.000	78,43%	100,00%	21,57%
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	6.375.000	5.000.000	78,43%	100,00%	21,57%
	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	516.450.000	474.362.609	91,85%	85,71%	6,14%



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kecamatan Rawalumbu
Tahun 2025

Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rp.	Realisasi Anggaran		Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30.000.000	29.004.189	96,68%	100,00%	3,32%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	244.275.000	224.329.597	91,83%	100,00%	8,17%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.000.000	25.673.215	85,58%	100,00%	14,42%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20.000.000	17.632.500	88,16%	100,00%	11,84%
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	167.175.000	153.303.108	91,70%	100,00%	8,30%
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	25.000.000	24.420.000	97,68%	100,00%	2,32%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	37.536.000	36.963.000	98,47%	100,00%	1,53%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	37.536.000	36.963.000	98,47%	100,00%	1,53%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.060.020.390	5.732.166.348	94,59%	100,00%	5,41%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	350.000.000	238.250.972	68,07%	100,00%	31,93%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.710.020.390	5.493.915.376	96,22%	100,00%	3,78%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	499.850.000	368.563.377	73,73%	100,00%	26,27%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	92.245.000	49.633.149	53,81%	100,00%	46,19%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	165.000.000	80.029.400	48,50%	100,00%	51,50%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	42.605.000	40.159.800	94,26%	100,00%	5,74%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200.000.000	198.741.028	99,37%	100,00%	0,63%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	151.432.000	134.096.388	88,55%	100,00%	11,45%
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	126.432.000	112.147.683	88,70%	100,00%	11,30%



**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kecamatan Rawalumbu
Tahun 2025**

Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rp.	Realisasi Anggaran		Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	30.000.000	26.002.253	86,67%	100,00%	13,33%
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	15.000.000	14.484.000	96,56%	100,00%	3,44%
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	30.000.000	28.506.236	95,02%	100,00%	4,98%
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	26.432.000	21.080.930	79,76%	100,00%	20,24%
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	25.000.000	22.074.264	88,30%	100,00%	11,70%
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	25.000.000	21.948.705	87,79%	100,00%	12,21%
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	25.000.000	21.948.705	87,79%	100,00%	12,21%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	50.000.000	47.498.000	95,00%	100,00%	5,00%
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	50.000.000	47.498.000	95,00%	100,00%	5,00%
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	50.000.000	47.498.000	95,00%	100,00%	5,00%
	Total	22.412.356.390,00	20.074.926.918,00	89,57%	95,24%	5,67%

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa terdapat 3 (tiga) program, 10 (tiga) kegiatan dan 26 (dua puluh enam) Sub Kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan, dengan anggaran sebesar **Rp. 22.412.356.390 (dua puluh dua**



milyar empat ratus dua belas juta tiga ratus lima puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah) tingkat realisasi anggaran sebesar **Rp. 20.074.926.918.** dengan persentase realisasi anggaran sebesar 89,57%, yang terbagi Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar **Rp. 22.210.924.390** tingkat realisasi anggaran sebesar **Rp. 19.893.332.530** dengan persentase sebesar 89,57%.

Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik sebesar Rp. **151.432.000** tingkat realisasi anggaran sebesar **Rp. 134.096.388** dengan persentase sebesar 88,55%.

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sebesar **Rp. 50.000.000** tingkat realisasi anggaran sebesar **Rp. 47.498.000** dengan persentase sebesar 95,00%

Jika dikaitkan dengan capaian realisasi Indikator Kinerja Utama Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan sebesar 7,25% dari target nilai sebesar 0,54% atau dengan capaian kinerja hanya sebesar 1219,77%%, pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik dan Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Tahun 2025 tidak dilakukan refocusing anggaran dikarenakan demi menunjang sarana dan prasarana untuk meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Akan tetapi terdapat Efisiensi Anggaran yang mencapai 5,17% pada Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, 11,45% pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik serta 5% pada Program Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum yang dimana pada 3 program tersebut keterlibatan masyarakat dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan cukup signifikan sehingga anggaran yang dialokasikan tidak terserap 100%.



f. Analisa Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Angka efisiensi 5,67% umumnya berarti bahwa untuk mencapai target output/outcome yang sama, Kecamatan Rawalumbu berhasil menghemat 5,67% dari total anggaran yang seharusnya atau yang dianggarkan. Dengan kata lain, biaya aktual yang dikeluarkan lebih rendah 5,67% dari rencana awal, tanpa mengurangi kualitas atau kuantitas hasil.

Tingkat efisiensi 5,67% merupakan indikator positif bahwa inovasi pelayanan di Rawalumbu dikelola dengan prinsip kehati-hatian anggaran. Hal ini selaras dengan semangat pemerintahan yang efektif. Namun, efisiensi harus dipandang sebagai alat untuk mencapai outcome yang lebih baik, bukan tujuan akhir. Tantangan ke depan adalah mempertahankan efisiensi tanpa mengorbankan kualitas layanan, keberlanjutan program, dan kesejahteraan SDM. Keberhasilan sejati adalah ketika angka efisiensi tinggi diiringi dengan peningkatan kepuasan baik warga maupun pegawai.

3.3 Realisasi Anggaran

Capaian Kinerja pada Kecamatan Rawalumbu berdasarkan hasil realisasi keuangan dan fisik kegiatan pekerjaan yang telah dilakukan secara umum pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi Tahun Anggaran 2025 berjalan sesuai dengan Output dan Outcome sudah dicapai dan tidak mengalami permasalahan dan hambatan yang berarti dalam pelaksanaan program kerjanya ditunjang dari sisi pendanaan pada tahun anggaran 2025. Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi pada tahun anggaran 2025 menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi dengan perincian sebagai berikut :

Dana APBD Rp. **43.258.758.065,-**



**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kecamatan Rawalumbu
Tahun 2025**

Tabel 18 Pagu Anggaran Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi Per Program Tahun 2025

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Pagu Anggaran	
		Sebelum Perubahan (Rp.)	Setelah Perubahan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	21.848.809.080	21.272.764.440
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	151.432.000	100.768.000
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	11.093.603.400	9.436.183.400
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	50.000.000	20.000.000
5	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	1.340.695.000	1.208.600.000
Total		34.484.539.480	32.038.315.840

Alokasi Anggaran Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi pada Tahun 2025 sebelum perubahan sebesar **Rp. 34.484.539.480,-** dan setelah perubahan sebesar **Rp. 43.258.758.065,-** realisasi yang sudah terlaksanakan pada Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi adalah sebesar **Rp. 40.795.398.767,-** yang terdiri atas :

Tabel 19 Realisasi Anggaran Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi Per Program Tahun 2025

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Pagu Anggaran	Realisasi	%	Efisiensi
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	22.210.924.390	19.893.332.530	94,74%	5,17%
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	151.432.000	134.096.388	88,55%	11,45%
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	19.567.231.400	19.452.363.728	99,41%	5,66
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	50.000.000	47.498.000	95%	5%
5	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	1.279.170.275	1.268.108.121	99,14%	0,86%
Total		43.258.758.065	40.795.398.767	94,31%	5,69%



Pada sasaran strategis Kecamatan Rawalumbu dengan indikator diatas hampir keseluruhan target yang telah ditetapkan telah tercapai, realisasi anggaran pada Tahun 2025 sebesar **Rp. 40.795.398.767,-** dari pagu sebesar **Rp. 43.258.758.065,-** ada beberapa kegiatan yang capaian target keuangan tidak tercapai akan tetapi capaian fisik kegiatan tersebut telah tercapai 100% dengan tidak mengurangi kualitas kegiatan yang dilaksanakan dan tidak mengurangi laporan yang harus tetap tercapai disetiap bulan dan triwulan.

Dijelaskan pada **Tabel 30** bahwa tingkat efisiensi anggaran pada Kecamatan Rawalumbu mencapai 5,68%, dalam pelaksanaan setiap kegiatan untuk menunjang tercapainya target yang telah ditetapkan pada setiap sasaran terdapat efisiensi anggaran dan efisiensi sumber daya manusia, antara lain :

1. Efisiensi Pengadaan
2. Manajemen Pengeluaran, seleksi ketat terhadap kegiatan pendukung yang dinilai kurang berdampak langsung pada output prioritas (pengentasan kemiskinan dan stunting), sehingga anggaran dialokasikan secara sangat hati-hati.
3. Optimalisasi kolaborasi dengan unsur LKM
Tingginya realisasi didorong oleh aktivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat. Dukungan 100% LKM aktif (RT/RW, LPM, BKM, Posyandu dan PKK) mempercepat eksekusi program di lapangan.



BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan Umum

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban Kecamatan Rawalumbu atas penyelenggaraan program kegiatan pada Tahun 2025 yang sekaligus menjadi masukan dan bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Kecamatan Rawalumbu telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Pada tahun 2025 ini Kecamatan Rawalumbu memiliki 2 (dua) sasaran strategis serta 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU). Secara umum realisasi masing-masing IKU telah tercapai sesuai dengan target. Sementara apabila dibandingkan dengan target perencanaan pada RPJMD Tahun 2025-2029, maka terlihat bahwa pada tahapan renstra tahun 2025 ini hampir keseluruhan target yang telah ditetapkan telah tercapai, bahkan ada beberapa yang melebihi target. Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam Renstra Kecamatan Rawalumbu Tahun 2025-2029 khususnya untuk Tahun Anggaran 2025 terpenuhi sesuai dengan harapan.



Berdasarkan hasil realisasi keuangan dan fisik kegiatan dan pekerjaan yang telah dilakukan secara umum pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi Tahun Anggaran 2025 berjalan sesuai dengan Output dan Outcome sudah dicapai dan tidak mengalami permasalahan dan hambatan yang berarti dalam pelaksanaan program kerja.

4.1.1 Simpulan Capaian Kinerja

Alokasi anggaran Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi pada tahun 2025 sebesar **Rp. 43.258.758.065,-** terdiri dari Belanja Langsung Penunjang Urusan (BLPU) **Rp. 22.210.924.390,-** dan Belanja Langsung Urusan (BLU) **Rp. 21.047.833.675,-**. Seluruh Kegiatan sampai dengan akhir Desember 2025 dengan realisasi fisik 87,95%.

1.2 Rencana Tindak Lanjut

Berdasarkan capaian kinerja Kecamatan Rawalumbu Tahun 2025, terdapat hal-hal yang perlu dilakukan guna meningkatkan capaian kinerja pada Renstra Kecamatan Rawalumbu Tahun 2025-2029. Beberapa hal yang telah dilakukan guna meningkatkan capaian kinerja tersebut diantaranya :

1. LKIP Kecamatan Rawalumbu merupakan hasil pertanggungjawaban instansi pemerintah atas kinerja yang telah dicapai, oleh karena itu penyusun berharap adanya dukungan kerjasama antara berbagai pihak khususnya di Kecamatan Rawalumbu agar terjalin komunikasi yang baik.
2. Meningkatkan pengendalian dan evaluasi terutama dalam penyusunan Program yang ada di Kecamatan Rawalumbu agar dapat mempertimbangkan perkembangan isu strategis/perubahan regulasi lokal, regional, dan nasional, sehingga dapat dengan cepat dilakukan penyesuaian kebijakan sesuai dengan kewenangan yang telah dilimpahkan dari Wali Kota kepada Camat;



3. Meningkatkan kapasitas sumberdaya aparatur disamping mekanisme pelaksanaan kegiatan yang berpengaruh dalam menghasilkan capaian kinerja yang berkualitas, hal penting lainnya adalah kapasitas sumberdaya aparatur yang kompeten dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Meningkatkan kualitas data dan informasi atas capaian kinerja. Capaian kinerja yang dikumpulkan sesuai dengan SOP pengumpulan data kinerja merupakan salah satu strategi yang harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelaporan yang selaras dengan dokumen Renstra Kecamatan Rawalumbu Tahun 2025-2029 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2025-2029.

Dalam hubungan ini masyarakat umum perlu dilibatkan untuk berpartisipasi dan mempunyai informasi yang cukup tentang tujuan dan sasaran pembangunan Kota Bekasi mulai perencanaan pembangunan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) dari tingkat kelurahan dan kecamatan, berperan serta dalam monitoring dan evaluasi.

Demikian semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025 ini dapat bermanfaat untuk lebih meningkatkan kinerja kita dimasa yang akan datang.